

POLITIK LUAR NEGERI MASA DEMOKRASI LIBERAL

Sepanjang tahun 1950 hingga 1959, sistem demokrasi liberal berlaku di Indonesia. Pada masa ini pula, pemilihan umum (pemilu) pertama digelar di tanah air yakni pada 1955. Selama masa tersebut, pemerintahan di Republik Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem ini menempatkan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang memimpin kabinet berisi para menteri. Adapun presiden hanya berkedudukan sebagai kepala Negara. Dalam menjalankan pemerintahannya perdana menteri bertanggungjawab kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ciri khas sistem ini adalah kuatnya pengaruh Dewan yang jadi representative dari partai. Maka itu, masa ini kerap disebut demokrasi parlementer. Di masa Demokrasi Parlementer, muncul banyak partai politik yang bebas berpendapat dan saling bersaing.

Namun, kuatnya pengaruh parlemen menyebabkan pemerintahan di Indonesia tidak stabil. Kabinet pemerintahan sering berganti, bergantung pada ke arah mana mayoritas suara anggota parlemen. Pada masa demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950-1959, tercatat 7 kabinet pemerintahan pernah aktif. Kabinet-kabinet itu diberi nama sesuai dengan nama perdana menteri yang berkuasa. Daftar kabinet pada masa demokrasi liberal di Indonesia adalah:

1. Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)
3. Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953)
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Juli 1955)
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955- Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957)
7. Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959)

Ketika kabinet berganti dengan sosok perdana menteri berbeda, berubah pula orientasi kebijakan pemerintah Indonesia di dalam maupun luar negeri. Kebijakan akan mengikuti arah ideologi partai politik yang perwakilannya mendominasi kabinet, terutama kursi perdana menteri. Dinamika tersebut turut memengaruhi arah kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia. Di tahun 1950-1959, beberapa kali terjadi pergeseran arah kebijakan politik luar negeri, meski tetap dalam koridor prinsip "bebas-aktif."

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia hingga sistem demokrasi liberal (demokrasi parlementer) diberlakukan, kebijakan politik luar negeri RI tetap menganut prinsip bebas aktif. Prinsip bebas aktif berarti Indonesia secara bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional, dengan tanpa mengikatkan diri secara apriori kepada kekuatan dunia mana pun. Mengutip dari *Modul Sejarah Indonesia: Menjalani Persahabatan Dunia* terbitan Kemdikbudristek RI (2021), pencetus prinsip politik luar negeri bebas aktif adalah Mohammad Hatta. Wakil Presiden RI pertama tersebut mengajukan gagasan tentang prinsip bebas-aktif pada 1948.

Hatta menguraikan gagasannya itu di pidato berjudul "Mendayung di Antara Dua Karang" ketika ia menghadiri sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia

Pusat (BP-KNIP), 2 September 1948. Gagasan Hatta sesuai dengan kondisi Republik Indonesia sebagai negara yang baru merdeka serta sedang menghadapi tantangan di internal maupun eksternal. Pada 1948, RI sedang terancam oleh aksi militer Belanda yang hendak berkuasa kembali. Pada saat yang sama, RI belum mendapatkan pengakuan secara luas dari dunia internasional sebagai negara merdeka.